BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusiinstitusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006).

Proses pembangunan saling berkaitan dengan industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti taraf hidup yang lebih bermutu. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.Pengukuran dalam perekonomian di suatu negara adalah produk bruto (PDB).

PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB Riil) Sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan petumbuhan riil yang terjadi karena adanya pertumbuhan produksi (Mankiw:2007).

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta manghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Menurut Kusumosuwidho (1981), kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka (open employment). Berdasarkan analisis dinamika dan karakteristik ketenagakerjaan dengan konteks khusus dan untuk mengidentifikasi dan memahami

penyebab-penyebab utama dibalik kendala dan tantangan, serta peluang utama, guna meningkatkan lapangan kerja produktif secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, *tujuan dari analisis diagnostik untuk pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja*, yang selanjutnya disebut sebagai *diagnostik ketenagakerjaan* adalah untuk memahami sifat dari defisiensi lapangan kerja produktif dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala pada serta peluang untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja, dengan fokus pada memberikan dasar pengetahuan yang baik untuk dapat mengembangkan kebijakan yang efektif, reformasi kelembagaan dan intervensi lainnya yang ditujukan untuk mengurangi defisiensi lapangan kerja produktif.

Tujuan dari analisis diagnostik ketenagakerjaan adalah untuk melengkapi perangkat analitis lain yang sudah ada, dan bukan untuk membuat perangkat itu tak dibutuhkan lagi. Peran paling penting dari diagnostik ketenagakerjaan adalah sebagai instrumen untuk membuat bagan dengan cakupan yang luas dan memahami„tataran pengembangan lapangan kerja dan ekonomi‟ yang khusus untuk negara itu; untuk diagnosis pertama dimana kendala-kendala, tantangan dan peluang utama untuk meningkatkan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja dapat ditemukan.

Peran utamanya adalah untuk membantu mengidentifikasi isu-isu apa yang perlu ditangani guna meningkatkan lapangan kerja produktif dan mencapai target-target lapangan kerja yang sudah ditentukan melalui proses yang terstruktur dengan baik.

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengertian tenaga

kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia sejak 10 tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan.

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokkan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana penyerapan tenagakerja pada sektor formal di kabupaten Pinrang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyerapan tenagakerja pada sektor formal di kabupaten Pinrang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pinrang

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pinrang dalam membuat rencana dan regulasi tentang tenaga kerja dan industri sektor formal agar industri tersebut dapat berkembang maksimal sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Bagi ilmu pengetahuan

   Sebagai bahan referensi bagi pengembangan penulisan selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa seorang tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Secara keseluruhan penduduk dalam suatu pemerintahan atau negara memiliki dua kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Usia yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia berumur 15 sampai 64 Tahun. Jadi setiap orang yang mampu atau bisa bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Menurut Teori Lewis dalam Mulyadi (2003), kelebihan penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian bukan merupakan suatu masalah. Kelebihann tenaga kerja di satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyedian tenaga kerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sector subsisten terbelakang. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah

relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murahnya biaya upah tenaga kerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi perusahaan di perkotaan untuk memanfaatkan tenaga kerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran tenaga kerja di sector subsisten akan diserap.

2. Klasifikasi tenaga kerja

Klasifikasi yang dibagi adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seorang penduduk yang memiliki usia produktif 15-64 Tahun baik yang ingin mencari kerja, belum bekerja ataupun yang sudah bekerja. Yang kedua adalah Bukan angkatan kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia lebih dari 10 tahun yang berkegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kategori ini adalah seperti mahasiswa, anak sekolah, ibu rumah tangga atau pengangguran sukarela. Secara kualitas juga klasifikasi dari tenaga kerja dibedakan menjadi tiga diantaranya.

a. Tenaga Kerja Terlatih, tenaga kerja jenis ini mempunyai suatu kelebihan dalam pengalamannya seperti apoteker, mekanik dan ahli bedah.

b. Tenaga Kerja Terdidik, tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dari pendidikan yang ia jalani baik itu formal atau non formal, pengacara, guru dan dokter.
c. Tenaga Kerja Tidak Terlatih dan Tidak Terdidik, jenis ini seperti pekerja kasar yang mengandalkan tenaga yang dimiliki seperti buruh angkut, asisten rumah tangga dan kuli.

3. Konsep Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Bakir dan Manning, 1984).Menurut UU No.14 Tahun 1969 Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja didefinisikan bahwa tenaga kerja itu adalah“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, didalam maupun di luar hubungan pekerjaan guna menghasilkan barang-barang maupun jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Swasono dan Sulistyaningsih, 1983).

Pengertian tenaga kerja tersebut mengandung maksud bahwa tenaga kerja mempunyai hubungan positif dengan kegiatan produksi karena sebagaisumber kekuatan yang senantiasa dapat mendorong kepastian produksi dalam hubungan ini ialah orang

yang aktif melakukan pekerjaan dan memproduksi dan atau menghasilkan barang dan jasa yang tidak digunakan oleh diri sendiri tetapi oleh masyarakat luas. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitastersebut (Kusumosuwidho, 1981).

Menurut Simanjuntak(1985) yangdimaksud tenaga kerja adalahpenduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan lain. Batas umur mínimum tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa ada batas umur maksimum.

Menurut Soeroto (2002) bahwa tenaga kerja secara keseluruhan adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Kusumosuwidho (1981)adalah penduduk dalam usia kerja yang diatur biasanya adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun, tetapi kebiasan yang dipakai di Indonesia adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Menurut Dumairy (1997) yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja, baik yang

sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan dengan batas usia minimum 15 tahun ke atas tanpa batas umur maksimum.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja,

Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.[2] Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,

b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional,
c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Devi lestsi:2000).

Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Tambunan:2002).

Dari definisi di tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja

disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi (suroso:2004).

Sitanggang dan Nachrowi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja yang antara lain:

a. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.
b. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.

Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua golongan, yaitu: 1). golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh; 2). golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan.

Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-Ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labor force (siswanto:2002)*.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golangan lainlain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat

4. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Menurut Sadono (2004:18), angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Sedangkan, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah

perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja.

Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas untuk kategori usia kerja (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, penduduk usia kerja adalah yang telah berusia 15 tahun atau lebih.

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai seberapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja (sepuluh tahun keatas) benar-benar aktif didalam bekerja dan tidak aktif bekerja. Jadi TPAK perbandingan antara angkatan kerja penduduk dalam usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan kerja.

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitupun sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (masih bersekolah dan mengurus rumah tangga) semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang membuat persentase TPAK juga mengecil.

Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa TPAK adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran *output* suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan *output* yang tinggi pula yang mempengaruhi PDB. Begitu pun pada pendapatan per kapita. meningkatnya TPAK suatu daerah, berarti meningkat pula pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Rasydi,2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya TPAK meliputi :

a. Jumlah penduduk bersekolah dan mengurus rumah tangga hubungan antara TPAK dan jumlah penduduk yang masih berekolah adalah semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil junlah angkatan kerja yang berarti semakin kecil TPAK.Tingkat umur Umur berkaitan dengan TPAK, dengan adanya kenyataan bahwa penduduk berumur muda umumnya mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan mereka umumnya bersekolah.
b. Tingkat upah. Kaitan antara tingkat upah TPAK adalah melalui kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

c. Tinggi pendidikan. Tingkat pendidikan berhubungan dengan TPAK karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja.

5. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekera atau disebut pekerja.

Menurut Esmara (1986) dalam Putu,2008, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. Sedangkan Sagir (1994:52) dalam Putu,2008, memberi pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang sudah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan.

Sukirno (2000:68) dalam Putu,2008, memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.Berdasarkan definisi di

atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesempatan kerja adalah penduduk yang berusia produktif yang sedang memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menujukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja menurut Tambunan[9], adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya kebutuhan berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur.

Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang secara riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak faktor, di antaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga faktor-faktor produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga kerja, misanya barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja.

Pada dasarnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja menurut Moch Heru Anggoro:

a. Pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi.
b. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan jembatan dan sebagainya.

Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memproleh penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan bagi tenaga kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, sebab jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasionalnya.

Semakin tinggi jumlah pendapatan nasional karena barang dan jasa, memungkinkan dilakukannya tabungan yang bisa untuk investasi. Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga

meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Begitu juga halnya yang terjadi dalam industri kecil, pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih baik dalam produktivitas kerjanya dan juga dalam mengelola usaha, hal tersebut sesuai dengan teori *human capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

6. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Michael Todaro). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja.

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk yang berkerja terserap dan tersebar

diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu :

a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masingmasing sektor.
b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di 9 (sembilan) sektor perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di hotel.

7. Sektor Informal

Menurut Kuncoro dalam (Priyandika, 2015) ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang sektor informal. Berikut ini beberapa definisi tentang sektor informal, yaitu :

a. Sektor informal sangat minim mendapat proteksi dari pemerintah dari segi hukum.
b. Sektor informal sendiri merupakan kegiatan usaha yang tergolong kecil dibatasi oleh jumlah tenaga kerja, modal, teknologi dan minim nya keterampilan.

Tujuan utama nya adalah memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikannya guna memperoleh pendapatan dan juga membuka lapangan pekerjaan.

Dari uraian diatas mengenai definisi sektor informal, dapat kita ketahui bahwa sektor informal adalah unit usaha yang berskala kecil dengan teknologi tradisional dan juga di bantu tenaga kerja tidak tetap yang berpendidikan rendah. Para pekerja di sektor informal umumnya merupakan imigran/urbanisator dengan jam kerja yang tidak teratur serta memperoleh pendapatan yang tidak pasti.

Menurut (Hidayat & Soewarno, 1979), definisi sektor informal secara umum adalah bagian dari praktek ekonomi kota dan desa yang belum memperoleh bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan secara baik yang telah

disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum bisa menggunakanya dengan baik.

Dari definisi tersebut dapat dibedakan antara sektor informal tradisional atau yang bergerak di pedesaan dengan sektor informal modern yang bergerak di sebuah perkotaan. Dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima.

Sebagaimana dikatakan (Bromley, 1978) pedagang kaki lima adalah pekerjaan yang memiliki peran penting. mayoritas kota di Afrika, timur tengah, amerika latin, dan asia. Begitu sangat penting dan khasnya pedagang kaki lima ini sampai menyebabkan istilah sektor informal sering diindetikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Kajian mendalam pada sektor informal pertama dilakukan oleh Keith Hart seorang antropolog Inggris tahun 1973, dengan penelitiannya di kota Accra dan Nima. (Ghana) tahun 1971, dari hasil penelitian ini konsep sektor informal, International Labour Office (ILO) mengembangkan dan menerapkan di delapan kota dunia ketiga yakni Lagos dan Kana (Nigeria), Free Town (Sierra Leone), Kolombo, Kumasi (Ghana), Kordoba, Manila, Campina (Brazil) dan Jakarta (Mustafa, 2008) Kemudian hasil penelitian (Sethuraman, 1981) menyebutkan bahwa kebanyakan kegiatan sektor informal sifatnya masih subsistem, oleh karena itu sektor

informal dapat diartikan sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	TAHUN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	**Nur Roh Nunung**	**2016**	**Analisis penyerapan tenaga kerja sector industri**	Variabel UMR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dijelaskan dengan adanya peraturan pemerintah Nomor : 25.2000. tanggal 6 mei 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom , untuk menentapkan UMR. Namun pihak lain pemerintah memberikan kebebasan untuk mengatur upah yang

				berada diatas minimum. Tetapi pada kenyataannya perusahaan menetapkan UMR dibawah harga pasar
2.	**Nachrowi djalal**	**2004**	Penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi pada 9 sektor di Indonesia	Variabel populasi menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Propinsi Kalimantan Timur, Bali, DKI/Jawa Barat.
3.	BoykeT.H situmorang	2005	Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi	a. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. b. Suku bunga tidak berpengaruh secara nyata terhadap kesempatan kerja.
4.	Arum Prasityaningsih	2012	Analisis Penyerapan tenaga kerja pada sector industri besar dan besar se eks karisidenan surakarta	Pengaruh nilai produksi, jumlah unit usaha dan pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektor industri namun variabel

				upah minimum tidak berpengaruh signifikan

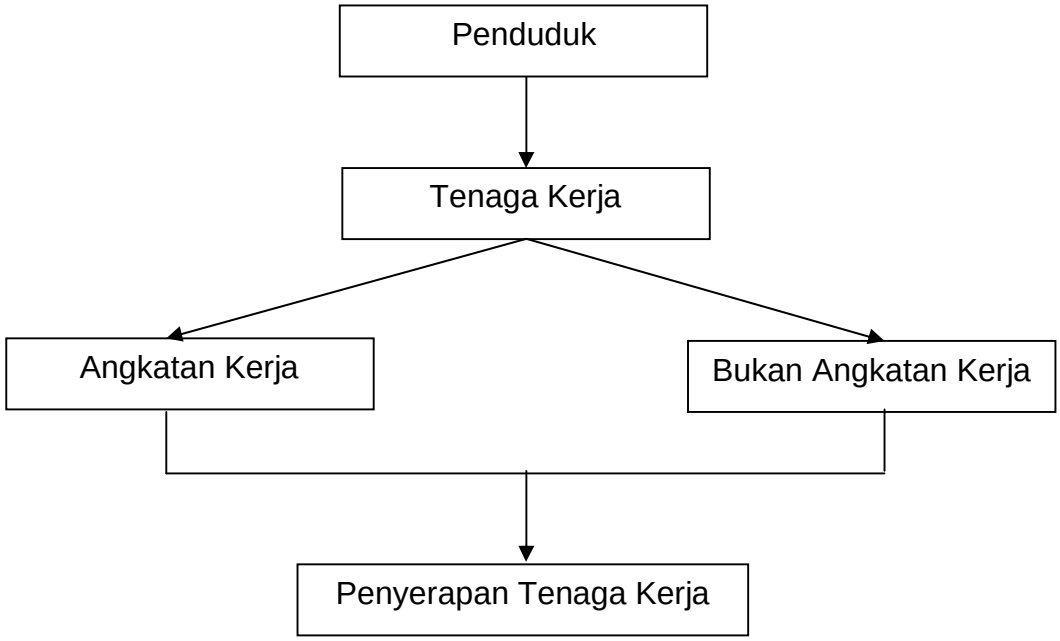
C. KERANGKA KONSEPTUAL

Tenaga kerja dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Golongan angkatan kerja yaitu kelompok yang ikut serta dalam pasar tenaga kerja,kelompok ini terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan bekerja dan menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan golongan bukan angkatan kerja terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok bersekolah, mengurus rumah tangga (MRT), dan yang terakhir adalah kelompok yang menerima pendapatan.

Meskipun kelompok ini tidak bekerja tetapi secara fisik dan mental mereka mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat masuk kedalam kelompok angkatan kerja,

Oleh karena itu kelompok ini dapat juga disebutkan sebagai angkatan kerja potensial (Potential Labor Force). Untuk dapat lebih jelas

memahami pengertian tenaga kerja menurut konsep labour force approach menurut Simanjuntak(1985), maka dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang

2 Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus-Okober 2020

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yakni:

1. Tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar
2. Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja
3. Sector informal adalah unit usaha yang berskala kecil dengan teknologi tradisional dan juga di bantu tenaga kerja tidak tetap yang berpendidikan rendah

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan kualitas data dan informasi serta analisis yang baik dan bermutu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara efektif dan efisisen, yaitu:

1. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara terencana sesuai tujuan penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
3. Dokumentasi, yaitu dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku literatur, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan maslah yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah:

   a. Data Primer

      Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sumber data penelitian ini diperoleh dari survey responden (Indriantoro 2009)

   b. Data Sekunder

      Data yang diperoleh dengan membaca buku, majalah, hasil penelitian yang sudah ada, atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, obsevasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Yusuf, 2014 : 400-401).

Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang bersangkutan untuk memperoleh kejelasan hasil yang dijadikan sebagai kesimpulan dan saran. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan elemen pertanggungjawaban manajemen keuangan.

Menurut Miles dan Huberman (2017:22), terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan)dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.Ibu kotakabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km2, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Patinjo. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur.

Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Pinrang ± 173 km dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kota Pare-pare
3. Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat : Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan terbagi atas 39 kelurahan dan 65 Desa.Kondisi Topografi wilayah

pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 – 2000 meter di atas permukaan laut.

Tipe Iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C dimana musim hujan terjadi pada Bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada Bulan Agustus hingga Bulan September, secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 280C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln.

B. Visi Misi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional,
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribinis dan agroindustri,

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal,
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

C. Wisata

Bagi anda yang ingin menikmati akhir pekan bersama keluarga, tak ada salahnya mencoba berkunjung di Pantai Dewata Wakka Kabupaten Pinrang. Tak hanya menyuguhkan pemandangan pantai, namun beberapa warga yang berdomisili di sekitar Pantai Wakka, juga menyediakan fasilitas rumah-rumah panggung berukuran kecil tepat di bibir pantai lengkap dengan menu ikan bakar. Harga yang ditawarkan kepada pengunjung cukup murah, cukup merogoh kantong sekitar Rp 300 ribu, pengunjung sudah mendapatkan dua keranjang berukuran besar dengan ikan berbagai jenis.

1. Jarak dari ibukota kabupaten : 28 Km

2. Lokasi / Kecamatan : Cempa

3. Pengelola : Pemerintah / Masyarakat

Pantai Kanipang merupakan salah satu Pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Pinrang. Terletak di Dusun Kanipang, Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang sebelah utara kota Pinrang dengan jarak tempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan atau sekitar 40 km. Tempatnya cukup tenang, masih sangat asri dengan hamparan pohon-pohon kelapa, tempat ini sungguh sempurna untuk melepas penat.

Jarak dari ibukota Kab

Lokasi / Kecamatan : Lembang

Pengelola : Pemerintah / Masyarakat

Ujung Lero adalah daerah yang masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Pinrang yang terletak di Kecamatan Suppa.Salah satu jalur transportasi menuju desa tersebut adalah dengan menggunakan jalur laut yang dapat ditempuh sekitar 10-15 menit dari Kota Parepare.Ujung Lero memiliki keindahan alam.Ujung Lero dihuni oleh dua suku yaitu Mandar dan Bugis.

Namun kebanyakan warganya adalah suku Mandar, penduduk setempat sangatlah ramah, sebagian besar warganya hidup sebagai nelayan selain mengandalkan hidup dari hasil laut, sebagian

mereka juga jadi pedagang dan penenun sutra.Ujung Lero dengan segala keindahannya dan keramahan penduduknya sungguh adalah pesona yang tersembunyi.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 30 Km

Lokasi / Kecamatan : Suppa

Pengelola : Masyarakat

Pantai Kappe memiliki pesona laut yang sangat indah dan bersih. Terletak di Desa Data, Kecamatan Duampanua. Panorama lautnya yang terhampar luas sejauh mata memandang dan dibagian utara tampak di kejauhan gunung-gunung yang menjulang diantara rimbunnya pepohonan hutan.Di pantai ini bisa melakukan aktivitas berenang dan aktivitas pantai lainnya.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 30 Km

Lokasi / Kecamatan : Duampanua

Pengelola : Masyarakat

Salah satu objek wisata bahari yang terletak di Desa Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, kurang lebih 16 km arah barat Kota Pinrang.Untuk mencapai tempat ini diperlukan waktu perjalanan kurang lebih 20 menit melalui jalan darat dan beraspal.Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri karena kita dapat menikmati matahari

terbenam dengan semilir angin pantai yang sejuk dan panorama pantai yang asri. Pantai Ujung Tape ramai dikunjungi masyarakat utamanya pada hari libur dan hari raya.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 16 Km

Lokasi / Kecamatan : Mattiro Sompe

Pengelola : Masyarakat

Pinrang kini telah memiliki sebuah sarana rekreasi air atau biasa dikenal dengan sebutan waterboom yang terletak di jantung Kota Pinrang. Waterboom ini dinamakan Waterboom Bhayangkara Pinrang karena dibangun di atas lahan Asrama Kepolisian Pinrang atas kerjasama antara Polres Pinrang,

Pemkab Pinrang dan investor. Pembangunan waterboom yang dimulai pada bulan Juli 2013 ini akhirnya resmi beroperasi dan terbuka untuk umum pada 14 Agustus 2014 dan diresmikan oleh Wakapolda Sulselbar, Brigjen Polisi Drs. Ike Edwin, SH.,MH, bersama-sama Kapolres Pirang, AKBP Hery Tri Maryadi dan Bupati Pinrang, A. Aslam Patonangi. Waterboom yang terletak di Jalan Basuki Rahmat ini dibangun dengan luas keseluruhan 2.450 meter persegi. Terdiri dari empat buah kolam (dewasa dan anak-anak) ditambah dengan air Tumpah Silindir dan Desaider serta Flyiing Fox.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 40 Km

Lokasi / Kecamatan : Watang Sawitto

Pengelola : Polres Pinrang

Kawasan Air Terjun Karawa dengan ketinggian 60 meter ini dibawahnya terdapat kolam-kolam alami dan bebatuan untuk beristrahat. Dari kolam alami ini, air mengalir melalui batu-batu gunung dan menciptakan air terjun kecil seolah bersusun-susun.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 40 Km

Lokasi / Kecamatan : Lembang

Pengelola : Masyarakat

Air Terjun Kali Jodoh adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang kurang lebih 45 km arah utara Kota Pinrang. Bila kita mengadakan perjalanan ke tempat ini hanya memerlukan waktu 45 menit lewat jalan darat.Air Terjun Kalijodoh mempunyai cerita tersendiri. Menurut ceritanya dinamakan kalijodoh karena pada zaman dahulu sepasang muda-mudi berhasil membina rumah tangga setelah datang ke tempat ini untuk bermustajab, memohon doa kepada Sang Pencipta untuk dipertemukan jodohnya. Hingga saat ini masyarakat Pinrang masih mempercayai cerita tersebut.

Jarak dari ibukota Kabupaten : 45 Km

Lokasi / Kecamatan : Lembang

Pengelola : Pemerintah / Masyarakat

Permandian ini terletak di Desa Sulili Barat Kecamatan Patampanua (Jaraknya 7 Km arah timur kota Pinrang).Waktu perjalanan kurang lebih 10 menit melewati jalan darat yang beraspal mulus. Fasilitas yang dimiliki tempat ini adalah pemondokan (tempat Peristirahatan) serta kolam mandi.Tempat ini banyak dikunjungi masyarakat, selain utuk berekreasi juga untuk mengobati berbagai penyakit kulit dan reumatik.

Permandian Air Panas Sulili ada dua sumber air yang mendukung suplai air untuk Permandian Air Panas Sulili, salah satunya yaitu sumber air panas yang terletak tidak jauh dari kolam utama tempat berendam.Keunikannya ialah sumber air panas seolah muncul dari perut bumi dan bukan berasal dari gunung berapi seperti sumber-sumber air panas lainnya yang lazim ditemui.Terletak di lingkungan Sulili Kelurahan Mamminasata Kecamatan Paleteang bagian selatan Kabupaten Pinrang.

Jarak dari ibukota kabupaten : 7 Km

Lokasi / Kecamatan : Paleteang

Pengelola : Pemerintah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pengumpulan data tentang ketenagakerjaan merupakan kegiatan rutin BPS Kabupaten Pinrang. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Selain melalui Sakernas, pengumpulan data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegiatan survei lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik tidak pernah berubah sejak 1976, kecuali untuk konsep pengangguran terbuka dan status pekerjaan, mulai tahun 2001 mengalami perluasan. Untuk lebih melengkapi data ketenagakerjaan, pada publikasi ini disajikan series data pokok ketenagakerjaan dari tahun 2010 sampai dengan Agustus tahun 2019. Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang 2019 ini menyajikan data lapangan pekerjaan yang dikelompokkan ke dalam 5 sektor.

Tabel-tabel yang disajikan dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan perdesaan), dengan penomoran table yang dimulai dengan tabel total.

1. Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok, yaitu Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 10 tahun yang selama, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan pekerjaan, dan bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potential labor force. Tenaga kerja terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu melakukan sesuatu.

Adapun tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Pinrang

Tahun	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja
(1)	**(13)**	**(14)**	
2019	3,11	58,20	
2018	3,04	59,14	0.94
2017	4,41	58,35	-0,79
2015	4,85	56,30	-2,05
2014	2,78	60,08	3,78
2013	1,96	52,07	-8,01
2012	5,35	54,94	2,87
2011	6,55	64,50	9,56
2010	7,79	58,86	-5,64

Sumber : BPS Pinrang 2021

Pada tabel 5.1 Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dapat diketahui, pada tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang mengalami pluktuatif namun apa bila dilihat dari data tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang lebih dominan mengalami penurunan dari pada meningkat dari data BPS Kabupaten Pinrang tahun 2010 sampai pada tahun 2019.

Begitupun juga dengan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang diketahui Partisipasi Angkatan Kerja mengalami pluktuatif dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019.

2. Tingkat Pengangguran Kabupaten Pinrang

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti mengalami penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Pengangguran di Kabupaten Pinrang merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan, adapun jenis pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang yakni:

Tabel 5.2
Jenis Pengangguran Yang ada di Kabupaten Pinrang

Tahun	Bekerja	Penganggruan pernah bekerja	Penganggruan tidak pernah bekerja	Jumlah Pengangguran
2019	151.266	2.655	2.196	4.851
2018	152.277	2.513	2.257	4.770
2017	146.653	5.496	1.273	6.769
2015	137.591	2.329	4.689	7.018
2014	148.110	1.874	2.369	4.243
2013	123.973	800	1.680	2.480
2012	126.724	2.849	4.310	7.159
2011	146.463	-	-	10.269
2010	129.156	3.748	7.170	10.918

Sumber : BPS Pinrang 2021

Pada tabel 5.2 jenis pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang yakni, Penganggruan pernah bekerja dan Penganggruan tidak pernah bekerja. Penganggruan pernah bekerja dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 mengalami pluktuatif dimana Penganggruan pernah bekerja lebih dominan meningkat.

Penganggruan tidak pernah bekerja dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 mengalami pluktuatif, dimana Penganggruan tidak pernah bekerja dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

3. Penyerapan Tenagakerja Kabupaten Pinrang

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenagakerja.

Adapun tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pinrang yakni

Tabel 5.3
Penyerapan Tenagakerja di Pada Lapangan Tenaga Kerja utama di Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019

Referensi Survei	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	55.000	26.625	69.641	**151.266**
2018	58.232	12.790	81.255*	**152.277**
2017	60.526	9.459	76.668*	**146.653**
2015	73.754	10.612	53.225*	**137.591**
2014	70.669	6.472	70.969*	**148.110**
2013	63.389	6.792	53.792*	**123.973**
2012	66.439	6.406	53.879*	**126.724**
2011	78.792	7.921	59.750*	**146.463**
2010	64.656	11.399	53.101*	**129.156**

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Pada tabel 5.3 Penyerapan Tenagakerja yang ada di Kabupaten Pinrang yang berperan penting yakni sektor pertanian, sektor manufaktur dan sektor jasa. Adapun penyerapan tenaga kerja pada sector pertanian dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 mengalami pluktuatif dan dominan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena Kabupaten Pinrang dari sector pertanian yang berperan penting.

Begitupun dengan sector manufaktur dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan sektor jasa dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 dari tahun ke tahun mengalami penurunan

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan sektor unggulan, di Kabupaten Pinrang yaitu terutama sektor pertanian semakin strategis, karena merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pinrang masih dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan hasilnya baik optimalisasi pemanfaatan lahan maupun pemanfaatan tenaga kerja, sehingga PDRB sektor pertanian terhadap penerimaan daerah Kabupaten Pinrang meningkat.

Factor lain selain dari pertanian yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja yakni luas lahan dimana semakin bertambah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, semakin luas lahan berarti semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman dan untuk panen.

Terkonsentrasinya industri pada beberapa kabupaten dan kota tertentu, sementara sebagaian yang lain justru memiliki tingkat kepadatan yang rendah, pada akhirnya akan semakin meningkatkan kesenjangan antar daerah. Kondisi ini akan terus berjalan, manakala perintah daerah maupun pusat sebagai penentu kebijakan tidak segera mengantisipasi permasalahan tersebut.

Begitupun dengan unit usaha, jika unit usaha meningkat maka akan terjadi kenaikan terhadap permintaan tenaga kerja, karena semakin banyaknya jumlah unit usaha industri sedang dan besar akan meningkatkan jumlah faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Sehingga dengan adanya kenaikan permintaan tenaga kerja akan berakibat pada penurunan tingkat pengangguran. Penambahan unit usaha memerlukan penambahan tenaga kerja serta menimbulkan permintaan akan tenaga kerja baru yang lebih besar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dapat diketahui, pada tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang mengalami pluktuatif namun apa bila dilihat dari data tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Pinrang lebih dominan mengalami penurunan dari pada meningkat dari data BPS Kabupaten Pinrang tahun 2010 sampai pada tahun 2019.

Penyerapan Tenagakerja yang ada di Kabupaten Pinrang yang berperan penting yakni sektor pertanian, sektor manufaktur dan sektor jasa. Adapun penyerapan tenaga kerja pada sector pertanian dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019 mengalami pluktuatif dan dominan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena Kabupaten Pinrang dari sector pertanian yang berperan penting.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian, maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti pada penelitian ini:

1. Kebijakan pemerintahan dalam penetapan upah khususnya sektor industri manufaktur diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga terciptanya pasar tenaga kerja.

2. perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam mempermudah pembebasan pengurusan izin usaha, sehingga jumlah unit usaha di Jawa Tengah semakin meningkat dan berdampak pada penigkatan penyerapan tenaga kerja lebih banyak di sektor industri manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

Alghofari,Farid.2008. *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980- 2007*. Semarang:Undip

Badan Pusat Statistik, 2008. *Jawa Tengah Dalam Angka 2014*. Semarang Sugandi.2009. *Sistem Infomasi Geografis*. Fakultas Ilmu Pendidikan: Universitas Ilmu Pendidikan.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 Tersedia Di: Www.Bps.Go.Id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik

BKKBN. 2011. *Aplikasi Program Specktrum*. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama ,Cetakan Empat, 2011)

Devi Lestyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya: *Fakultas Ekonomi, Unesa)*

Moch Heru Anggoro,Jurnal: *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya* (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

Michael Todaro . *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga 2000)

Payaman Simanjutak.*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.*(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)

Pitartono,Ronny.2012.*Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997- 2012*. Semarang: Universitas Diponegoro

Putu, Ayu. 2008**.** Analisis Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Piramida Vol V No. 1*. Bali: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Rusli, Said. 1989. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES

Rasydi,Anwar. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.* Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah

Rahman, Abdur. 2011. *Inderaja Dan Sistim Informasi Geografis Perairan (Gmkb604)*. Banjarbaru: Universitas Lambung Mangkurat

Sugito, Nanin. 2013. *Survey dan Pemetaan.* Jakarta: Universitas Pendidikan Inonesia.

Sitanggang Dan Nachrowi,*Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik Di 30 Propinsi Pada 9 Sektor Di Indonesia*

Siswanto Sastrohadiwirjo. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara,)

Suroso.*Ekonomi Produksi*. (Bandung: Lubuk Agung 2004)

Tambunan.*Tenaga Kerja*. (Yogyakarta: Bpfe 2002)

Zuardi, Khoirullah. 2015. *Proyeksi Kesempatan Kerja Di Kota Medan Pada Tahun 2011-2015.* Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.